

SKRIPSI

FIDA RAKHMAWATI

PENYALAHGUNAAN PRAKTEK POLIGAMI DALAM ISLAM



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

PENYALAHGUNAAN PRAKTEK POLIGAMI DALAM ISLAM

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamillah, S.H., M. Hum.

NIP : 130531799

Penyusun,



Fida Rakhmawati

NIM : 039914849

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**Skripsi ini telah dinyatakan dan dipertahankan
dihadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2003**

Ketua : DR. Afdol, S.H., M.S.

Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.

2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya, tidak terdapat perbedaan mendasar antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam mengenai poligami karena memiliki kesamaan adanya kemungkinan untuk terjadi poligami dengan syarat-syarat. Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah monogami yang bersifat tidak mutlak karena dimungkinkan adanya poligami dengan izin pengadilan, yang hanya diberikan apabila memenuhi alasan dan syarat-syarat untuk dapat berpoligami. Perkawinan dalam Hukum Islam berasas monogami, namun terdapat kemungkinan untuk berpoligami dengan tujuan dan aturan serta tidak dimaksudkan menganiaya atau mempermainkan perempuan. Poligami diperbolehkan dalam Islam sebagai pengecualian dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan mendasak. Bagi pria WNI Muslim yang hendak berpoligami, harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Islam. Namun kenyataannya, banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan sebaliknya di masyarakat. Pada praktek poligami, masih terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan masih terjadi penyalahgunaan, bahkan dengan

menyiasati hukum agar terhindar dari persyaratan dan prosedur hukum untuk melegalkan tata cara poligami yang akan dilakukan.

- b. Poligami menggunakan data palsu melalui pembuatan KTP baru merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang berlaku dan poligami semacam itu cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Poligami seperti itu sangat merugikan para wanita terutama istri pertama sebab telah merendahkan harkat, martabat dan hak asasinya sebagai istri (wanita) sehingga merasa diperlakukan tidak adil, serta akan berakibat negatif pada istri pertama atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilakukan istri terhadap poligami dengan menggunakan data palsu tersebut adalah mengajukan pembatalan perkawinan suaminya yang baru ke pengadilan dengan maksud mempertahankan perkawinan sebelumnya karena perkawinan suaminya yang baru tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Pembatalan perkawinan ini merupakan upaya penegakan hukum dan hak-hak sebagai istri yang sah sehingga para istri (kaum wanita) merasakan bahwa harkat, martabat dan hak asasinya dilindungi dan tidak dipermainkan.

2. Saran

- a. Perlu diberikan bimbingan secara intensif (wajib) bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan supaya mereka mengerti betul hakekat, tujuan serta akibat perkawinan sehingga tercipta keluarga yang bahagia, kekal,

sejahtera tanpa ada poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pengadilan harus benar-benar menunaikan tugasnya secara profesional, pengadilan harus berani menolak apabila suami (pria) yang ingin melakukan poligami tidak memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa memandang bulu siapapun pelakunya sehingga para istri (wanita) merasa dilindungi hak-haknya secara wajar dan benar. Bagi pemerintah, perlu membuat suatu sistem kependudukan dan KTP yang bersifat nasional supaya penerobosan-penerobosan terhadap hukum yang berkaitan dengan poligami dapat dihindari, sehingga dapat lebih terjamin bahwa perkawinan yang dilangsungkan bebas dari unsur pemalsuan identitas dan penipuan.

- b. Para istri (wanita) perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan dengan cara membaca peraturan perkawinan, mengikuti ceramah atau seminar agar dapat mempertahankan dan menuntut haknya apabila dilanggar oleh para suami. Selain itu, bagi pemerintah dirasakan perlu untuk meninjau kembali sanksi pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena untuk pejabat atau petugas pelaksana perkawinan atau pelaku poligami yang tidak memenuhi prosedur dan syarat dari peraturan yang berlaku hanya dikenakan sanksi denda Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sanksi ini sangat ringan untuk saat ini karena setiap orang mampu membayarnya, sehingga perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang agar ketentuan mengenai poligami yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mudah untuk dilanggar.